

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan merupakan isu yang berkembang di masyarakat Indonesia. Perpajakan adalah salah satu entitas komersial yang digunakan pemerintah untuk mencapai kemandirian bangsa dan negara dalam membiayai pertumbuhan ekonomi untuk kebaikan semua orang. Pajak merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berkontribusi pada ekspansi dan pertumbuhan ekonomi di sejumlah industri yang berbeda. Pemerintah dapat menggunakan sumber daya ekonomi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi dengan mengumpulkan pajak. Selain itu, pajak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum untuk membantu pembangunan suatu bangsa, karena peran yang dimainkannya masyarakat harus dilihat sebagai hal yang penting bagi bangsa dan penting bagi warga negara dan pemerintah sadar akan pentingnya pajak dan tahu caranya. Pajak berdasarkan undang-undang adalah keseluruhan kontribusi keuangan rakyat Indonesia kepada negara, tanpa pertukaran jasa timbal balik (Raihan, 2021:2). Dari temuan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk mendanai fungsi dan proyek pemerintah, mereka juga digunakan untuk membangun fasilitas umum untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pajak juga dapat dianggap sebagai kontribusi

paksa terhadap sistem pajak, Akibatnya masyarakat pajak harus memikul beban yang dapat dikelola agar dapat dihindari oleh masyarakat meskipun dikenakan pajak dan digunakan untuk mendanai pembangunan nasional yang nyata memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pembangunan negara dan negara penghasil uang. Karena pajak sangat penting bagi penerimaan Dana Perbendaharaan Negara. Selain taktik-taktik lainnya, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan reformasi pajak yang melibatkan perubahan pembayaran pajak sebelumnya dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Dalam hal ini, para wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang secara mandiri. Sistem ini akan berfungsi secara efektif jika pemerintah memperketat pengawasan dan para wajib pajak sadar bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku dan secara konsisten membayar pajak mereka tepat waktu, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak agar dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan negara yang direncanakan, yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Kata "penggerak" yang berasal dari kata Latin untuk "saran atau perintis", merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya mematuhi undang-undang perpajakan dan membayar kewajiban. Aparat senantiasa mengedukasi masyarakat tentang nilai pajak bagi kesejahteraan mereka dengan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Raihan, 2021:2). Salah satu komponen penting dalam melakukan kegiatan adalah motivasi. Pendidikan

merupakan aspek wajib pajak lainnya yang harus membayar pajak. Hal ini disebabkan karena bertambahnya dampak pada pola pikir dan perilaku seseorang. Dalam (Putri et al., 2022:3) Dengan kata lain, tingkat pendidikan tinggi dan pengetahuan memengaruhi kemudahan mengajarkan masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah dapat dengan mudah meyakinkan masyarakat bahwa segala sesuatu yang kita miliki memerlukan pengorbanan dan harus dibayar. Karena pajak masih sangat penting di Indonesia, kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi penerimaan pajak. Jumlah orang yang secara sukarela mendaftar untuk mengurus NPWP, yang dilarang oleh undang-undang, menunjukkan betapa rendahnya angka tersebut. Karyawan boleh mendapatkan penghasilan lebih dari PTKP, tetapi menurut Pasal 21 SPT Tahunan PPh, mereka tidak memiliki NPWP. Namun, masyarakat dengan penghasilan di atas PTKP harus memiliki NPWP. (Rahman, 2018:4) Kesadaran wajib pajak secara otomatis meningkat ketika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup: Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel, termasuk kemauan untuk membayar pajak, tingkat pendidikan, dan informasi terkait pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perorangan dan pada akhirnya memenuhi target pembayaran pajak mereka, pemerintah harus secara rutin mengadopsi langkah-langkah sosialisasi. Pajak dinaikkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi sarana utama dimana negara memperoleh pendanaan untuk berbagai pengeluaran untuk proyek-proyek rutin dan pembangunan oleh negara. Namun, pencapaian yang direncanakan pemerintah tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Sangat penting bagi masyarakat untuk

berperan dalam membayar pajak. Jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan kecenderungan mereka untuk tidak mengajukan pajak. Pengumpulan pajak sulit, harus ada kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak umumnya menghindari membayar pajak mereka secara adil. Kurangnya sanksi pajak bagi pembayar pajak yang tidak patuh, rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum perpajakan, dan ketidaktahuan akan hukum-hukum tersebut semuanya berkontribusi pada kecenderungan ini.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	Jumlah wajib pajak aktif	Jumlah wajib pajak yang wajib melapor SPT	Jumlah wajib pajak yang melapor SPT	Pencapaian
2018	290,808	54,591	49,258	90%
2019	308,702	64,398	53,500	83%
2020	341,939	69,467	52,788	76%
2021	370,573	67,957	56,117	83%
2022	400,034	75,350	61,019	81%

Sumber : (KPP Pratama Batam Selatan)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepatuhan secara keseluruhan pada tahun 2018 adalah sebesar 90%. Bersama dengan jumlah orang yang melaporkan pajak, atau 49.258, WPOP yang tercatat adalah 290.808. Dengan jumlah wajib pajak (WP) sebanyak 308.702 dan total 53.500 yang melaporkan pajaknya, tingkat kepatuhan turun menjadi 83% pada tahun 2019. Meskipun terdapat 341.939 WP yang terdaftar pada

tahun 2020, tingkat kepatuhan WP turun menjadi 76% karena rendahnya jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan tingkat kepatuhan sebesar 83% dan wajib pajak yang melaporkan penghasilannya lebih banyak dibandingkan tahun 2020. Dengan kenaikan pajak dan penurunan wajib pajak yang melaporkan pajaknya sebesar 61.019, tingkat kepatuhan menjadi 81% pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, Batam memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah wajib pajak yang mendaftarkan setiap tahun meningkat, banyak dari mereka yang tidak menyerahkan SPT. Hal ini akan sulit untuk mempertahankan persyaratan pajak yang lebih tinggi. Elemen-elemen berikut ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka: DJP berupaya menerbitkan pajak dan peraturan tentang pentingnya membayar pajak dan pelaporan pajak, serta menekankan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan dengan cara yang benar. Wajib pajak juga memahami pentingnya membayar pajak dan diberikan instruksi tentang cara mengajukan pajak, membayarnya, dan menerima hukuman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum kepada DJP tentang bagaimana pengaruh motivasi, edukasi, dan kesadaran wajib pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan.

Kesadaran dari mereka yang mendaftarkan diri, menyampaikan SPT, membayar dan menghitung pajak terutang dapat digunakan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. Semuanya, termasuk perubahan yang dilakukan, berpengaruh pada keadaan. Oleh pemerintah dalam bentuk

perpajakan tidak memiliki efek negatif atau positif. Dalam penelitian (Ratnawati et al., 2019:9) Hasil pengujian menggunakan analisis regresi moderat menunjukkan bahwa kesadaran pajak memoderasi dampak pendidikan, kualitas layanan, dan akuntabilitas kepatuhan perpajakan; nilai beta positif menunjukkan bahwa kesadaran memperkuat dampak pendidikan, kualitas layanan, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk mematuhi aturan yang berlaku semakin memperkuat dampak pendidikan, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Hasil penelitian lainnya Hasilnya menunjukkan bahwa Positif dan bermakna pengaruh antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi .Beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pajak kesadaran kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai tertinggi untuk variabel pengetahuan perpajakan terdapat pada indeks pengetahuan penerimaan pajak negaraterletak di perangkat di elemen 2, seperti pengetahuan tentang sumber pendapatan negara terbesar berasal dari pajak dengan total skor aktual 44. Hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 0,792 dimana hasil tersebut termasuk dalam skor berkisar antara 0,60 hingga 0,799. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Anggadini et al., 2022:6). DJP dapat menindaklanjuti pentingnya pendidikan berjenjang dalam pelaksanaannya melalui sosialisasi berkelanjutan, penyuluhan perpajakan, seminar perpajakan, pelatihan, dll.

Peneliti memilih judul **“ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN”** berdasarkan latar belakang informasi yang telah diuraikan sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang penelitian, berikut adalah beberapa masalah yang diidentifikasi:

1. Tingkat kepatuhan KPP Pratama Batam mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.
2. Individu yang membayar pajak tetapi gagal untuk mematuhi karena kurangnya motivasi internal.
3. Pemerintah akan kesulitan meyakinkan warga akan pentingnya membayar pajak bagi masyarakat Kota Batam yang kurang berpendidikan atau berpengetahuan.
4. Masih kurangnya kesadaran perpajakan di Kota Batam. Statistik menunjukkan masih banyak pekerja yang belum memiliki NPWP, bahkan mereka yang memilikinya enggan membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk pembahasan masalah batasan agar lebih terarah secara sempit pada pokok permasalahan dalam penelitian ini. Batasan masalah antara lain:

1. Responden wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini adalah di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Periode penelitian data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan konteks sejarahnya, dan termasuk yang berikut:

1. Apakah pengaruh motivasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Selatan?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah motivasi dan tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan.
2. Dampak edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui motivasi dan edukasi KPP Pratama Batam Selatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Setiap tahunnya, KPP Pratama Kota Batam membandingkan setiap aspek kinerja dengan menggunakan dasar temuan penelitian.
2. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan sistem tahun berjalan untuk memungkinkan perbaikan dana dan pelaksanaan perubahan sistem saat ini berfokus terutama pada ilmu perpajakan dan pendidikan.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Sebagai informasi yang akan memperluas pengetahuan masyarakat atau peneliti yang akan datang.
2. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk memajukan pengetahuan dan menginspirasi penyelidikan lebih lanjut.